



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. Laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya juga menyediakan informasi tentang peningkatan pembangunan sarana prasarana Publik.

1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Komponen laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya periode pelaporan tahun 2018 berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang – undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016) ;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 4);



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

13. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 31);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 23).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian target Kinerja APBD SKPD

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang
ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 4.1.1. Pendapatan
 - 4.1.2. Belanja
- 4.2. Beban
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 4.3.1 Aset
 - 4.3.2 Kewajiban
 - 4.3.3 Ekuitas
- 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENUTUP



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD SKPD

II.1. EKONOMI MAKRO

APBD merupakan gambaran dalam bentuk *record* tertulis tentang pelaksanaan pembangunan suatu daerah. APBD disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pertanggungjawaban APBD diperlukan sebagai bentuk evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan selama satu tahun anggaran.

APBD Kota Palangka Raya tahun 2019 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, di mana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Penyusunan APBD Tahun 2018 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis / objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

4. Keadilan Anggaran

Pajak, Retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan hal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai pelaksanaan Program/kegiatan APBD.

Berikut ini adalah kondisi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2019 :

1. Geografis

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 6°40' – 7°20' Bujur Timur dan 1°30' – 2°30' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat: Kabupaten Katingan Kota Palangka Raya mempunyai Luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) ibagi kedalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut,

Sebangau, Jekan Raya, Bukit batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km².

Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km²
2. Tanah Pertanian : 12,65 Km²
3. Perkampungan : 45,54 Km²
4. Areal Perkebunan : 22.30 Km²
5. Sungai & Danau : 42.86 Km²
6. Lain-lain : 69,41 Km²

II. 2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan – tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
 2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan Pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
 3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
 4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
 5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Sejalan dengan strategi belanja daerah tersebut, maka prioritas belanja daerah tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- 1) Prioritas pembangunan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
- 2) Mengupayakan seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja.
- 3) Menghindari pemborosan anggaran belanja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sangat diperlukan. Dalam kaitan, maksud di atas prioritas pembangunan daerah tahun 2018 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut:
 - a. Penggalan dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah adalah meningkatkan ekonomi rakyat dan penguatan otonomi daerah dengan program prioritas sebagai berikut :
 - 1) Program pengembangan kelembagaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana Dispenda serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - 2) Program pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
 - 3) Program intensifikasi pendapatan asli daerah
 - 4) Program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan.
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan berdasarkan prinsip-prinsip
 - 1) Hemat, tidak mewah sesuai dengan ketentuan teknis yang diisyaratkan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- 2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing badan, dinas, lembaga, satuan perangkat kerja daerah.
- 3) Keharusan untuk sedapat mungkin menggunakan kemampuan dan hasil produksi dalam negeri.
- 4) Mengutamakan rekanan pengusaha golongan ekonomi lemah.
- c. Prioritas anggaran untuk program dan kegiatan dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik
- d. Dengan semangat dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

II. 3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

II. 3. a. Pendapatan LRA

Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah Rp. 0,-

II. 3. b. Belanja

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.557.263.502,00 -, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Realisasi 2019 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 1 | Belanja Pegawai | 3.918.528.624,00 | 2.634.086.658,00 | (-)1.284.441.966 | (48,76) |
| 2 | Belanja Barang dan | 2.638.734.878,00 | 2.308.825.144,00 | (-)329.909.734 | (14,29) |



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

| | | | | | |
|--|--------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| | Jasa | | | | |
| | Jumlah | 6.557.263.502,00 | 4.942.911.802,00 | (1.614.351.700) | (32,66) |

Rincian Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.6.557.263.502,00-, tertuang pada lampiran LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.952.479.050,00-, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Realisasi 2019 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) | % |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 1 | Belanja Peralatan dan Mesin | 1.952.479.050,00 | 445.549.775,00 | (1.506.929.275) | (338,22) |
| 2 | Belanja Bangunan dan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rincian Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp. 1.952.479.050,00-, tertuang pada lampiran LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Strategi anggaran belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang tersedia serta kondisi perekonomian.

Secara umum kebijakan pemerintah telah menetapkan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- a. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan
- b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
- c. Revitalisasi pertanian dan pedesaan
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi
- f. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta mencegah munculnya konflik vertikal maupun horizontal
- g. Merehabilitasi dan mengkontruksi daerah yang terkena bencana alam.

II. 4 INFORMASI TENTANG ORGANISASI

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pasal 239

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya pelaksanaan urusan Pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 240

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Persandian dan Statistik. Dalam



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan lingkup lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan dan keselamatan dibidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup lalu lintas ; angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan dan keselamatan dibidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan dan keselamatan dibidang perhubungan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

Dan Persandian Kota Palangka Raya

Pasal 238

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditetapkan dengan Tipe A, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang membawahkan:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 3. Seksi Keamanan dan Informasi Telekomunikasi.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, yang membawahkan :
1. Seksi Kehumasan dan Layanan Komunikasi;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik; dan
 3. Seksi Tata Kelola E-Government.
- f. Bidang Persandian dan Statistik, yang membawahkan :
1. Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
 2. Seksi Layanan Operasional Persandian dalam Pengamanan Informasi;
dan
 3. Seksi Statistik dan Sektoral .



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

III.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas Laporan Keuangan adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

111.2 KEBIJAKAN PELAPORAN

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Palangka Raya mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Mudah dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya kepada para pemakai/ stakeholders.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

A. Asumsi Dasar/Basis Akuntansi

Neraca Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu :

1. Basis akuntansi (accounting basis);

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan Operasional. Dalam hal ini peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.
- b. Basis Akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
- c. Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. Basis Akrua Untuk Neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2. Prinsip nilai perolehan (historical cost principle);

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip realisasi (realization principle);

1. Ketersediaan Pendapatan (basis Kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak mendapat penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sector swasta.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (substance over form principle);

1. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip periodisitas (periodicity principle);

1. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan dan semesteran sangat dianjurkan.

6. Prinsip konsistensi (consistency principle);

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsipkonsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure principle);

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (fair presentation principle).

1. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat dalam mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

B. Definisi Unsur Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang. Unsure-unsur dari Laporan Realisasi anggaran adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut sudah benar-benar diterima.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui saat transaksi dilakukan (accrual basic), baik kas sudah dikeluarkan ataupun belum.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

- a. Asset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

A. AKTIVA

Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aktiva. Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan, dan aktiva lain-lain.

i. Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aktiva lancar terdiri atas:

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alai pembayaran Sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kota Palangka Raya yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- 1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran, adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.
 - 1.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan stock opname.
 - 1.2.2. Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil stock opname.

ii. Piutang

- 2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 2.2 Piutang terdiri atas: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- 2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :

- a. Klarifikasi piutang menurut umur
- b. Klarifikasi piutang menurut debitur

3) Persediaan Barang Pakai Habis / Material

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja dan sebagainya.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis/ Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis/ Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis/ Material dinilai berdasarkan:
 - a. Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - b. Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/ klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) Investasi Jangka Panjang



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (investee) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) Aktiva Tetap

- 5.1 Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai mana manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.
- 5.3 Aktiva tetap antara lain terdiri dari :
1. Tanah
 2. Peralatan dan Mesin
 - a. Alat-Alat Berat.
 - b. Alat Angkutan
 - c. Alat Bengkel dan Alat Ukur.
 - d. Alat Pertanian.
 - e. Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga.
 - f. Alat Studio dan Alat Komunikasi.
 - g. Alat-Alat Kedokteran.
 - h. Alat-Alat Laboratorium.
 3. Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- a. Bangunan Gedung
- b. Bangunan Monumen
- 4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
 - a. Jalan dan Jembatan.
 - b. Bangunan Air (irigasi).
 - c. Instalasi
 - d. Jaringan
- 5. Aset Tetap Lainnya
 - a. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
 - b. Hewan Ternak dan Tumbuhan.
 - c. Alat Keamanan.

5.4 Penjelasan Akun Aktiva Tetap

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

d. Instalasi



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

f. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

g. Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

h. Alat-alat Berat

Alat-alat Berat meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

i. Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

j. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

k. Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen, penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan. Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

m. Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

n. Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

o. Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

p. Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

s. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

5.4.1 Pengakuan

- a. Aktiva tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- b. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aktiva tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aktiva karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aktiva tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan :

- (1) diperpanjang usia manfaat,
- (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aktiva tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap. Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aktiva yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aktiva.

ii. Pengukuran

- a. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- b. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- c. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

(termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

- d. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- e. Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- f. Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- g. Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- h. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- i. Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- j. Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- k. Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- l. Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- m. Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- n. Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- o. Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- p. Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- q. Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- r. Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- s. Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- t. Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

5.4.1.1 Penilaian

Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.1.2 Pengungkapan

- a. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- b. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) Dana cadangan

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) Aktiva Lain-Lain



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan dana Cadangan. Aktiva lain-lain terdiri dari:

7.1 Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

7.2 Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan penjelasannya

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan Cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3 Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- 7.4** Lain-Lain aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

A. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Utang dikelompokkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

1. Kewajiban jangka pendek

- a. Utang Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Jangka Pendek terdiri atas :
- 1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 - 2) Kewajiban Biaya Pinjaman merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan commitment fee/ Commitment Charge. Bunga adalah beban



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belch pihak. Commitment Fee adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- 3) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
 - b. Utang jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
 - c. Utang jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapanannya.
 - d. Utang jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Kota Palangka Raya yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2016.

2. Kewajiban jangka panjang

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- a. Utang jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, Berta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. Utang Bunga merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. Utang Belanja merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah dibebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. Utang Pajak merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Kota Palangka Raya namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. Pendapatan Diterima di Muka merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan.

- f. Utang Lain -lain merupakan utang Lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

B. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

a. Ekuitas Dana Lancar

- i. Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- ii. Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- iii. Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- iv. Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. Cadangan untuk piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2014. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
5. Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah kekayaan Kota Palangka Raya yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
6. Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

a. Ekuitas Dana Investasi

- 1) Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- 2) Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

b. Ekuitas Dana Cadangan

- 1) Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- 2) Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- 3) Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan
- 4) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan. Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya :
 1. Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
 2. Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Laporan Operasional

Unsur yang dicakup Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau baban luar biasa, tidak diharapkan sering atau rutin dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Laporan Perubahan Ekuita

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

- d. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- e. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan;
- f. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- g. Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- h. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- i. Daftar dan skedul;
- j. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, meliputi :

1. Mulai Tahun Anggaran 2015 laporan keuangan sudah menerapkan sistim Akuntansi berbasis akrual sehingga



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

mempengaruhi dalam laporan keuangan karena ada tambahan laporan operasional dan laporan perubahan SAL, dimana pada sistim akuntansi yang berbasis KAS belum ada.

2. Sejak tanggal 30 Desember 2016 terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.
3. Sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/484/2017 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Palangka Raya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
4. Sesuai dengan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/559/2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagai berikut
 - A. Aset Tetap
 1. Peralatan dan Mesin **Rp. 0,00**
 - 1.1 Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rp. 0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

a. Alat Kantor **Rp. 0,00**

b. Alat Kantor lainnya **Rp. 0,00**

c. Alat Rumah Tangga **Rp. 0,00**

d. Alat Rumah Tangga lainnya **Rp. 0,00**

1.2 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Rp. 0,00

1.3 Alat Pendingin **Rp. 0,00**

1.4 Personal Komputer dan Peralatan Personal
Komputer **Rp. 0,00**

1.5 Alat Studio dan Alat Komunikasi
Rp. 0,00

a. Peralatan Studio Visual **Rp. 0,00**

b. Peralatan Studio Video dan Film
Rp. 0,00

2. Gedung dan Bangunan **Rp. 0,00**

3. Aset Tetap Lainnya **Rp. 0,00**

TOTAL ASET TETAP Rp. 0,00

B. Aset lainnya (Aset Tidak Berwujud) Rp. 0,00

TOTAL ASET LAINNYA Rp. 0,00

5. Laporan hasil penelusuran barang yang tidak diketahui keberadaannya (TDK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah tentang barang yang tidak diketahui keberadaannya (TDK) sebesar **Rp. 312.603.467,66,-** (*Tiga ratus Dua Belas*



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh koma Enam Puluh Enam)

I. Hasil Penelusuran Pertama :

1. Peralatan dan Mesin (alat kantor dan rumah tangga lainnya) sebesar **Rp. 538.765.150,-** (*lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) diketemukan dalam keadaan/kondisi rusak berat. (data terlampir)
2. Peralatan dan Mesin (alat kantor dan rumah tangga lainnya) sebesar **Rp. 112.549.200,-** (*seratus dua belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) diketemukan dalam keadaan/kondisi baik. (data terlampir)
3. Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 281.800.000,-** (*dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) diketemukan dalam keadaan/kondisi baik. (data terlampir)
4. Terdapat barang yang dimasukkan dalam extracomtable karena nilai perolehan di bawah nilai kapitalisasi yaitu sebesar **Rp. 1.814.000,-** (*satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*). (data terlampir)

II. Hasil Penelusuran Kedua :

1. Pada Peralatan dan Mesin (peralatan jaringan) sebesar **Rp. 523.998.000,-** (*lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yaitu pembuatan Sistem Aplikasi Informasi satu Atap (SIMTAP) Tahun 2007



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

ditemukan dalam keadaan/kondisi rusak berat, yang tercatat pada KIB sebesar **Rp. 523.998.000,-** (*lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). (data terlampir).

2. Dari hasil penelusuran dengan mantan penyimpan barang dan staf eks Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya ditemukan double pencatatan pada KIB peralatan dan mesin (alat kantor dan rumah tangga lainnya) sebesar **Rp. 15.450.000,-** (*lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) yaitu 6 (enam) buah brankas. (data terlampir).

III. Jumlah barang yang ditemukan dan sisa barang TDK :

1. Total nilai barang TDK yang ditemukan dalam kondisi baik dan rusak berat sebesar **Rp. 1.474.376.350,-** (*satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
2. Sisa barang TDK yang tersaji sesuai dengan data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, yang tetap akan ditelusuri sebesar **Rp. 312.603.467,66,-** (*tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam puluh enam*).

IV. Hasil Penelusuran Ketiga :

Barang yang sudah yang ditemukan dari sisa **312.603.467,66,-** (*tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga*



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah) sebesar **Rp. 265.826.266,66,-** (*dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh enam rupiah*). Sisa yang masih ditelusuri sebesar **Rp. 46.777.201,-** (*empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah*).

V. Hasil Penelusuran Keempat :

Sisa barang yang tidak diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri sebesar **Rp. 46.777.201,-** (*empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah*). untuk Tahun 2018 ini belum dapat diketemukan keberadaannya mengingat barang-barang tersebut cukup terlalu lama tahun pengadaannya diantaranya Tahun 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 dan 2011 (kurang lebih 18 Tahun) pengadaan barang tersebut berupa meubel : lemari buku, lemari makan, almari, meja kursi, sofa, meja komputer. Kami berusaha untuk barang tidak diketahui keberadaannya ini dapat diketemukan pada Triwulan I Tahun 2019.

VI. Hasil Penelusuran Kelima :

Sisa barang yang tidak diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri sebesar **Rp. 46.777.201,-** (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah). barang yang sudah diketemukan dalam keadaan rusak berat sebesar **Rp. 10.390.001,-** (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Puluh Ribu Satu Rupiah) sehingga sisa yang masih ditelusuri sebesar **Rp. 36.387.200,-** (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

VII. Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019 pada hari jum'at tanggal 20 bulan Desember tahun 2019 telah dilakukan pemusnahan Barang Milik Daerah sebesar **Rp. 94.087.733,33,-** (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah koma Tiga Puluh Tiga Sen). Kondisi barang tersebut rusak berat. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan di km 14 tempat pembuangan akhir jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya. dasar pemusnahan surat keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/525/2019 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.

VIII. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya telah memiliki gedung kantor Eks Gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dengan dasar surat keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/546/2019 tentang Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan dari Dinas Kesehatan kota Palangka Raya kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Palangka Raya tanggal 16 Desember 2019 dengan nilai buku bangunan gedung kantor permanen sebesar **Rp.385.557.182,00,-** (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan gedung garasi / pool semi permanen sebesar **Rp. 113.750.000,00,-** (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga dengan total nilai buku sebesar **Rp. 499.307.182,00,-** (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

IV.1. Penjelasan Pos Neraca

IV.1.1. Kas

IV.1.1.1. Kas di bendahara pengeluaran

Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 0,00-**,

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebesar **Rp. 965.333,33-**,

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 965.333,33 | 1.045.333,33 |



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

IV.1.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan barang-barang yang dimaksud untuk tidak dijual dan/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil opname sebagaimana terlampir). Dan Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian **Rp. 2.045.625,-** merupakan persediaan barang ATK dengan rincian kertas HVS Folio F4 70 gram sebanyak 15 Rim , kertas NCR sebanyak 4 Buah, dan Tinta Printer sebanyak 8 Botol.

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 2.045.625,00 | 980.950,00 |

IV.1.1.1.3 Aset Tetap

Data Awal Aset tetap pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya merupakan hasil penilaian kembali Aset pada Tahun 2005. Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2019 sebesar **Rp.2.886.485.418,22** dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Tanah | Rp. | 0,00 |
| Peralatan Mesin | Rp. | 3.932.269.868,56 |
| Gedung Bangunan | Rp. | 599.192.950,00 |
| Aset Tetap Lainnya | Rp. | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | Rp. | (1.644.977.400,34) |
| JUMLAH ASET TETAP | Rp. | 2.886.485.418,22 |
| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> | |
| 2.886.485.418,22 | 1.021.813.147,24 | |

IV.1.1.1.4 ASET LAINNYA

Aset Tidak Berwujud :

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Nilai Awal | Rp. | - |
| Beban Penyusutan | Rp. | - |
| Aset Tidak Berwujud | Rp. | 550.998.000,00 |
| Aset Lain-Lain | Rp. | 1.118.929.817,66 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | Rp. | 1.669.927.817,66 |
| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> | |
| 1.669.927.817,66 | 1.587.607.341,99 | |

| | | |
|--------------------|------------|-------------------------|
| Penyusutan | Rp. | - |
| JUMLAH ASET | Rp. | 4.559.424.194,21 |



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|------------------------|------------------------|
| 4.559.424.194,21 | 2.611.446.772,56 |

IV.1.a KEWAJIBAN **Rp. 4.658.364,00**

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 4.658.364,00,-**

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|------------------------|------------------------|
| 4.658.364,00 | 1.165.782,00 |

IV.1.b EKUITAS

EKUITAS **Rp. 4.554.765.830,21**

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|------------------------|------------------------|
| 4.554.765.830,21 | 2.610.280.990,56 |

JUMLAH EKUITAS DANA

TOTAL EKUITAS DANA

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA **Rp. 4.559.424.194,21**

IV. 2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

IV.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya pada Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 0,00,-**

IV.2.2 BELANJA

1. Belanja Operasi **Rp. 6.557.263.502,00**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 6.557.263.502,00 | 4.942.911.802,00 |
| Belanja Pegawai | Rp. 3.238.358.624,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.318.904.878,00 |
| Belanja Hibah | Rp. 0,00 |
| 2. Belanja Modal | RP. 1.952.479.050,00 |

| <u>Tahun 2019 (Rp)</u> | <u>Tahun 2018 (Rp)</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1.952.479.050,00 | 445.549.775,00 |
| Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga | Rp. 143.120.000,00 |
| Belanja Pengadaan Komputer | Rp.1.676.385.050,00 |
| Belanja Pengadaan Alat Studio | Rp. 132.974.000,00 |
| Belanja Pengadaan Alat Komunikasi | Rp. 0,00 |
| Belanja Pengadaan Peralatan Pemancar | Rp. 0,00 |

IV.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

IV.3.1 Pendapatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebesar **Rp. 0,00,-**,



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

IV.3.2 Beban

Jumlah Realisasi Beban Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebesar **Rp.7.069.082.761,02** dengan tabel rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Saldo 2019 | Saldo 2018 | Kenaikan/(Penurunan) | (%) |
|----|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 01 | Beban Pegawai – LO | 3.918.528.624,00 | 2.634.086.658,00 | 1.284.441.966,00 | 48,76 |
| 02 | Beban Persediaan | 525.145.850,00 | 275.304.575,00 | 249.841.275,00 | 90,75 |
| 03 | Beban Jasa | 1.177.550.653,00 | 1.341.825.439,00 | (164.274.786,00) | (12,24) |
| 04 | Beban Pemeliharaan | 127.637.600,00 | 110.938.555,00 | 16.699.045,00 | 15,05 |
| 05 | Beban Perjalanan Dinas | 810.908.682,00 | 555.281.557,00 | 256.627.125,00 | 46,04 |
| 06 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 509.311.352,02 | 581.105.954,32 | (71.794.602,30) | (12,35) |
| 10 | Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 7.069.082.761,02 | 5.498.542.738,32 | 1.570.540.022,70 | 28,56 |

IV.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dengan tabel rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

| No | Uraian | 2019 | 2018 |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 01 | EKUITAS AWAL | 2.610.280.990,56 | 2.447.791.537,58 |
| 02 | SURPLUS/DEFISIT-LO | (7.069.082.761,02) | (5.498.542.738,32) |
| 03 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | |
| | Koreksi Nilai Persediaan | 0 | 0 |
| | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| | Koreksi ekuitas lainnya | 503.825.048,67 | 272.570.614,30 |
| 04 | KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | 8.509.742.552,00 | 5.388.461.577,00 |
| 05 | EKUITAS AKHIR | 4.554.765.830,21 | 2.610.280.990,56 |



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Per 31 Desember 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007
2. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA


Drs. ARATUNI, M.T
NIP.19640416 199403 1 013